Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

# TINDAK TUTUR DALAM PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN EMMANUEL MACRON TAHUN 2025

Mazaya Candra Aqila Huda1 Ismirani Mardalena2
Universitas Indonesia
Pos-el: mazaya.candra@ui.ac.id ; ismirani@ui.ac.id

**Résumé**

Le discours présidentiel est un instrument diplomatique agissant par le langage. Cette recherche analyse les actes de langage dans six discours présidentiels d'Emmanuel Macron en 2025, en Europe, en Asie du Sud-Est et dans les pays francophones, selon Searle (1969) pour les actes de langage et Leech (1981) pour l'analyse componentielle. Les actes assertifs sont majoritaires, fondement légitimant les idées diplomatiques, avec des configurations variant selon les régions. La présence minimale d'actes commissifs dans la zone francophone traduit une gestion du poids historique sans abandon du contrôle des territoires contestés. En Europe, les déclaratifs performatifs et les actes commissifs intensifs affirment le leadership régional. En Asie du Sud-Est, le poids majoritaire des actes commissifs positionne la France comme une alternative stable face à la polarisation géopolitique. Ces résultats montrent que le choix des énoncés construit l'image, la légitimité et le positionnement stratégique de la France dans l'ordre géopolitique.

***Mot-clés*** *: Discours, Emmanuel Macron, Actes de langage, l'analyse componentielle, Légitimation diplomatique*

**Abstrak**

Pidato kenegaraan merupakan instrumen diplomasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga melakukan tindakan politik melalui bahasa. Penelitian ini menganalisis tindak tutur dalam enam pidato kenegaraan Presiden Emmanuel Macron tahun 2025 di kawasan Eropa, Asia Tenggara, dan negara frankofon, menggunakan teori tindak tutur Searle (1969) dan komponen makna Leech (1981). Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak tutur asertif mendominasi seluruh pidato sebagai landasan faktual yang melegitimasi gagasan diplomatik, dengan konfigurasi tindak tutur pendukung yang berbeda di setiap kawasan. Tindak tutur komisif minimal di kawasan frankofon mencerminkan pengelolaan beban historis tanpa pelepasan kontrol wilayah sengketa. Sementara itu, deklaratif performatif dan komisif intensif di Eropa menandai upaya mengukuhkan kepemimpinan regional. Kemudian, dominasi komisif di Asia Tenggara memposisikan Prancis sebagai alternatif stabil di tengah polarisasi geopolitik. Temuan ini membuktikan bahwa pilihan ujaran dan makna berfungsi sebagai sarana pembentukan citra, legitimasi, dan posisi strategis Prancis dalam tatanan geopolitik global.

**Kata kunci** : Pidato, Emmanuel Macron, Tindak Tutur, Komponen Makna, Legitimasi diplomatik

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

## 1. Pendahuluan

Sejak jabatannya sebagai Presiden Prancis di tahun 2017, Prancis Emmanuel Macron telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Eropa, Afrika, Amerika, Timur Tengah, hingga Asia-Pasifik, yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran Prancis dalam skala global. Menurut Malis dan Smith (2021), *state visit* atau kunjungan kepresidenan bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan instrumen politik yang memiliki fungsi strategis dalam mempertahankan kekuasaan. Kunjungan tatap muka antara pemimpin negara berfungsi sebagai sinyal publik dan bukti kredibilitas mengenai kekuatan politik pemimpin yang dikunjungi. Kemudian, Malis dan Smith (2021) lebih lanjut menjelaskan bahwa *state visit* bersifat timbal balik. Selaras dengan hal tersebut, tujuan dari kunjungan kepresidenan juga berkaitan dengan konteks politik dan diplomatik Prancis pada tahun 2025, yang turut memengaruhi arah dan kepentingan kebijakan luar negeri negara tersebut. Menurut Fontanel (2025), Prancis tengah menghadapi ketegangan sosial, serta penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Berdasarkan dokumen negara Revue Nationale Stratégique 2025 yang dipublikasikan oleh pemerintah Prancis melalui *Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN),* diterangkan bahwa pada tahun 2025, Prancis berfokus pada penguatan otonomi strategis Eropa, peningkatan kapasitas pertahanan, serta penguatan jaringan diplomatik dan pengaruh internasional Prancis dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang kondisinya sedang tidak stabil. Dalam konteks itu, Prancis menekankan pentingnya memperkuat kemitraan internasional dan kerja sama multilateral sebagai strategi untuk menjaga stabilitas global serta melindungi kepentingan strategisnya. Melalui penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai kawasan, Prancis berupaya mempertahankan perannya sebagai aktor global yang aktif dalam mendukung tatanan internasional yang berbasis pada kerja sama, stabilitas, dan aturan bersama. Oleh karena itu, Prancis melakukan berbagai kunjungan diplomatik ke sejumlah negara yang telah lama tidak menjadi tujuan kunjungan kepresidenan, sebagai upaya memperkuat kembali hubungan bilateral, memperluas jaringan kemitraan strategis, serta menegaskan kembali peran diplomatiknya di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Dalam setiap kunjungan kenegaraan, pidato Presiden memainkan peran penting sebagai instrumen diplomasi. Secara umum, pidato (*speech*) merupakan bentuk komunikasi lisan yang bersifat monologis dan disampaikan kepada khalayak dengan tujuan tertentu, seperti memengaruhi, meyakinkan, atau mengarahkan audiens (Mouritzen, 2016). Pidato memiliki struktur yang relatif teratur yang meliputi pembukaan, pengembangan gagasan, dan penutup persuasif, serta ditandai oleh penggunaan bahasa yang terencana dan kontekstual. Lebih lanjut lagi, Pidato sebagai salah satu bentuk wacana dapat dipahami sebagai alat untuk membangun makna dan merepresentasikan realitas sosial. Wacana menghasilkan dan membangun makna dari apa yang ada, sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat terwujud jika tidak dapat dipikirkan dan diungkapkan melalui bahasa (Carta dan Morin, 2014). Melalui pilihan leksikal, susunan pembahasan, dan strategi retoris, pidato tidak bersifat netral, melainkan mengandung kepentingan tertentu yang berkontribusi dalam

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

membentuk persepsi audiens. Dalam konteks hubungan internasional, pidato kenegaraan tidak sekadar menjadi sarana komunikasi politik formal, tetapi juga merupakan praktik kebahasaan yang bersifat konstitutif, di mana negara merepresentasikan kepentingannya, membangun legitimasi, serta membentuk dan menegosiasikan relasi internasional (Kurbalija & Slavik, 2001).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kajian pragmatik menjadi relevan untuk memahami bagaimana makna dalam pidato kenegaraan tidak hanya ditentukan oleh makna isi pidatonya secara harfiah, tetapi juga oleh konteks penggunaannya. Menurut Yule (2010), Pragmatik merupakan kajian yang berfokus pada pada makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, makna tidak selalu bersifat literal, melainkan bergantung pada intensi penutur, relasi dengan audiens, serta situasi sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, analisis pragmatik dapat mengungkapkan makna implisit yang terkandung dalam tuturan. Salah satu pendekatan utama dalam pragmatik adalah teori tindak tutur (*speech act theory*) yang dikembangkan oleh John Searle, yang memandang bahwa ujaran tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan tertentu. Dalam konsep ini, tuturan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti *assertive*, *directive*, *commissive*, *expressive*, dan *declarative*, yang masing-masing mencerminkan fungsi dan tujuan komunikasi penutur (Searle, 1969). Dalam konteks pidato kenegaraan, pendekatan ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana Presiden tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga melakukan tindakan politik dan diplomatik melalui bahasa.

Secara resmi, pidato-pidato kenegaraan Presiden Prancis dipublikasikan melalui situs kepresidenan Élysée (*elysee.fr*) dan laman Kementerian Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis (*diplomatie.gouv.fr*), yang menjadikannya dokumen negara dan sumber primer yang dapat dianalisis secara linguistik. Berdasarkan uraian di atas, kunjungan kenegaraan Presiden Prancis pada tahun 2025 tidak hanya dapat dipahami semata sebagai agenda diplomatik rutin, melainkan sebagai praktik politik dan linguistik yang memiliki makna strategis. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin tidak stabil dan kompetitif, pidato kenegaraan dalam rangkaian *visite d'État* menjadi ruang untuk merealisasikan kepentingan nasional, proyeksi kekuatan, serta negosiasi posisi Prancis dalam tatanan internasional. Oleh karena itu, penelitian terhadap dimensi pragmatik dalam pidato-pidato tersebut menjadi relevan untuk mengungkap bagaimana makna, legitimasi, dan relasi kekuasaan dibangun melalui bahasa.

Penelitian terdahulu terkait tindak tutur sudah beberapa kali dilakukan. Kajian mengenai pidato kenegaraan dalam perspektif pragmatik menunjukkan bahwa bahasa politik tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai instrumen strategis dalam membangun legitimasi dan kekuasaan (Wulandari dkk. 2022; Ybañez dkk. 2025). Penelitian oleh Wulandari dkk. (2022) menganalisis tindak tutur ilokusi dalam wawancara Presiden Emmanuel Macron dan menemukan dominasi tindak tutur asertif yang merepresentasikan fungsi menyatakan, menjelaskan, dan melaporkan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks krisis domestik, Macron menggunakan bahasa sebagai sarana untuk membangun kredibilitas sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah. Sejalan dengan temuan tersebut, Ybañez dkk. (2025) dalam analisis terhadap pidato Presiden Rodrigo Duterte juga menemukan dominasi tindak tutur asertif, diikuti oleh direktif dan komisif,

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

yang menunjukkan bahwa pidato kenegaraan berfungsi sebagai bentuk *performative governance*, yaitu praktik bahasa yang membentuk otoritas politik sekaligus memengaruhi persepsi publik.

Dalam konteks diplomasi internasional, penggunaan tindak tutur tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun relasi dan solidaritas antarnegara. Gulamjonovich (2024) menekankan pentingnya strategi kesantunan (*politeness strategies*) dan penggunaan bahasa yang tidak konfrontatif dalam menjaga stabilitas hubungan internasional. Sejalan dengan itu, Purnomo (2025) menunjukkan bahwa fungsi persuasi dan solidaritas menjadi dominan dalam pidato diplomatik, yang direalisasikan melalui penggunaan modalitas, pronomina inklusif, serta pembingkaian moral. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian Ratnawati dkk. (2025) yang menganalisis pidato Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB dan menemukan bahwa berbagai jenis tindak tutur seperti *assertive*, *directive*, *commissive*, dan *expressive* digunakan secara bersamaan dengan strategi kesantunan untuk membangun solidaritas, menunjukkan rasa hormat, serta menciptakan efek persuasif dalam konteks komunikasi global. Dominasi strategi *positive politeness* dalam pidato tersebut menunjukkan upaya penutur dalam membangun kedekatan dan kerja sama dengan audiens internasional yang beragam, sehingga memperkuat peran bahasa sebagai instrumen diplomasi lintas budaya. Lebih spesifik lagi, kecenderungan penggunaan bahasa yang tidak langsung tersebut juga didukung oleh pemilihan bentuk linguistik yang fleksibel (Lei Li, 2020). Penelitiannya menunjukkan bahwa bahasa diplomatik cenderung bersifat implisit, eufemistis, dan tidak langsung untuk menghindari konflik serta menjaga hubungan antarnegara. Strategi ini memungkinkan penutur menyampaikan posisi tanpa komitmen yang terlalu kuat dan tanpa menimbulkan konfrontasi terbuka.

Jika dilihat dari kaca mata politik luar negeri, strategi bahasa diplomatik tidak dapat dipisahkan dari kepentingan geopolitik yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri Prancis di berbagai wilayah. López-Aranguren (2022) menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik merupakan pusat geopolitik global yang semakin penting karena faktor keamanan, ekonomi, dan demografi, sehingga mendorong negara-negara Eropa, termasuk Prancis, untuk meningkatkan proyeksi strategisnya di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, Prancis diposisikan sebagai salah satu aktor utama dalam strategi Indo-Pasifik Eropa, dengan penekanan pada aspek keamanan dan kerja sama regional. Sejalan dengan konteks tersebut, Bharti dan Singh (2023) menunjukkan bahwa strategi Indo-Pasifik Prancis merupakan instrumen geopolitik jangka panjang untuk memperluas pengaruh melalui multilateralisme, kerja sama pertahanan, dan penguatan relasi ekonomi. Lebih lanjut lagi, Młynarski (2024) menunjukkan bahwa penguatan kemitraan pertahanan Eropa merupakan bagian dari upaya Prancis memperkuat strategic autonomy, yaitu kemampuan negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri secara independen di tengah dinamika politik global.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pidato Emmanuel Macron pada jangka waktu sepanjang tahun 2025, di mana Macron melaksanakan tur dunianya ke Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Adapun poin penting dari penelitian ini adalah untuk membedah masing-masing tindak tutur pada tiap teks, beserta makna tuturan yang disampaikan, dengan menggunakan teori tindak tutur Searle (1969), serta teori komponen makna Leech (1981). Dari pengamatan yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

terdahulu terkait tindak tutur dalam teks pidato, ditemukan masalah penelitian berupa bagaimana praktik bahasa dalam pidato kenegaraan Presiden Emmanuel Macron merefleksikan arah diplomasi Prancis di Eropa, Asia Tenggara, dan negara Frankofon pada tahun 2025. Perlu adanya perbandingan dari masing-masing pidato di berbagai wilayah yang dikunjungi Macron agar dapat diketahui praktik bahasa yang digunakan, serta perbedaannya dari segi penggunaan bahasa. Penelitian ini berupaya membuktikan bahwa pilihan ujaran dan makna menjadi sarana pembentukan citra, legitimasi, serta posisi strategis Prancis dalam relasi bilateral dan tatanan geopolitik kawasan Eropa, Asia Tenggara, dan negara frankofon.

## 2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2009), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna yang diberikan oleh seorang individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipakai untuk membahas bagaimana praktik Bahasa dalam pidato kenegaraan Presiden Emmanuel Macron merefleksikan arah diplomasi Prancis di Eropa, Asia Tenggara, dan negara frankofon. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan berupa teks pidato yang diambil dari laman vie-publique.fr, laman resmi pemerintah prancis yang memuat berbagai pidato Macron beserta jajaran pejabat negara.

Adapun teks-teks yang dijadikan sumber data adalah teks pidato Macron di wilayah Frankofon yakni Madagaskar dan Mauritus, wilayah Eropa yakni Inggris dan Norwegia, dan wilayah Asia Tenggara yakni Vietnam dan Indonesia. Pemilihan teks tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan. Keenam pidato disampaikan pada tahun 2025 sehingga berada dalam konteks temporal yang sama sehingga dapat dilakukan analisis komparatif terhadap strategi diplomasi Prancis di tiga kawasan. Di kawasan frankofon, kunjungan ke Madagaskar merupakan yang pertama sejak Jacques Chirac pada 2005 (Liberation, 2025), dan kunjungan ke Mauritius menjadi yang pertama sejak 1993 (FranceInfo, 2025). Kedua negara juga memiliki persoalan serupa dengan Prancis, yaitu sengketa kepulauan di Samudra Hindia, sehingga pidato di kedua negara tersebut mengandung muatan diplomatik mengenai relasi historis dan isu teritorial. Di kawasan Eropa, Inggris dan Norwegia dipilih karena sama-sama bukan anggota Uni Eropa, dengan kunjungan ke Inggris sebagai kunjungan kenegaraan pertama pasca-Brexit (Chaaban, 2025), dan kunjungan ke Norwegia menjadi yang pertama sejak 1984 (BFM Business, 2025), sehingga keduanya merepresentasikan pendekatan Prancis terhadap mitra Eropa di luar kerangka Uni Eropa. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, kunjungan ke Indonesia merupakan yang pertama sejak Macron menjabat dan Vietnam dipilih karena merupakan satu-satunya negara ASEAN yang memiliki keterikatan historis dengan Prancis, sehingga keduanya merepresentasikan upaya Prancis memperkuat posisinya di Indo-Pasifik melalui pembukaan relasi baru dan revitalisasi relasi historis. Berikut judul pidato beserta tanggal pelaksanaan kunjungan Macron yang dijadikan sumber data penelitian ini.

Tabel 1. Korpus teks pidato Macron di negara Frankofon, Eropa, dan Asia Tenggara

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

| No. | Negara | Tanggal kunjungan | Judul pidato |
|---|---|---|---|
| 1 | Madagaskar (frankofon) | 23 April 2025 | *Déclaration à la presse de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur les relations entre la France et Madagascar, à Tananarive le 23 avril 2025* |
| 2 | Mauritus (frankofon) | 20 November 2025 | *Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur les relations entre la France et Maurice, à Maurice le 20 novembre 2025* |
| 3 | Inggris (Eropa) | 8 Juli 2025 | *Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur les relations entre la France et le Royaume-Uni, à Londres le 8 juillet 2025* |
| 4 | Norwegia (Eropa) | 23 Juni 2025 | *Conférence de presse de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur les relations franco-norvégiennes et le conflit entre l'Iran et Israël, à Oslo le 23 juin 2025* |
| 5 | Vietnam (Asia Tenggara) | 26 Mei 2025 | *Déclaration à la presse de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur les relations franco-vietnamiennes, les droits de douane américains, le conflit en Ukraine et l'islamisme en France, à Hanoï le 26 mai 2025* |
| 6 | Indonesia (Asia tenggara) | 28 Mei 2025 | *Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur le partenariat franco-indonésien et les questions internationales, à Jakarta le 28 mai 2025* |

Untuk menjawab masalah penelitian, dilakukan beberapa tahapan penelitian. Penelitian diawali dengan mengambil sumber data dari laman resmi *Vie-publique.fr,* yang terdiri dari 6 teks. Kemudian, teks dikelompokkan berdasarkan wilayah yang sudah ditentukan, yaitu Eropa, Frankofon, dan Asia Tenggara. Masing-masing dari teks korpus akan dilakukan klasifikasi berdasarkan 5 kategori Tindak Tutur *(speech acts)* yang dikembangkan oleh Searle (1969). Dalam teori pragmatik, konsep *speech acts* dikembangkan oleh Searle (1969) untuk menjelaskan bahwa penggunaan bahasa bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan tertentu melalui ujaran. Dalam *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language* (1969), Searle menyatakan bahwa berbicara dalam suatu bahasa pada dasarnya adalah melakukan tindakan yang diatur oleh aturan tertentu *(rule-governed behavior)*. Ia menjelaskan bahwa setiap kali seseorang menghasilkan suatu ujaran, ia sebenarnya melakukan suatu tindakan linguistik yang memiliki fungsi komunikatif tertentu. Oleh karena itu, unit dasar komunikasi linguistik bukanlah kata atau kalimat semata, melainkan tindakan menghasilkan ujaran tersebut dalam konteks tertentu, yang disebut sebagai *speech act*.

Searle (1969) membedakan tiga jenis tindakan utama dalam *speech act*, yaitu *utterance acts*, *propositional acts*, dan *illocutionary acts*. Berfokus pada *illocutionary act,* Searle (1969) mengelompokkan tindak ilokusi ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan komunikatif penutur dan hubungan antara ujaran dengan dunia. Klasifikasi ini membantu menjelaskan bagaimana satu ujaran dapat berfungsi sebagai pernyataan, perintah, janji, atau ekspresi sikap. Dalam kerangka teori Searle, setiap jenis memiliki fungsi pragmatik yang berbeda dalam interaksi komunikasi. Searle mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi ke dalam lima kategori, yaitu *assertives*, *directives*, *commissives*, *expressives*, dan *declarations*.

Setelah tiap kalimat pada masing-masing teks telah terklasifikasi, dilakukan analisis pada tiap teks dengan menentukan terlebih dahulu gagasan utama pada tiap teks. Setelah gagasan utama pada teks ditemukan, analisis dilanjutkan dengan membuktikan apakah tindak tutur pada teks berfungsi dengan baik dalam teks. Hal ini dibuktikan dengan menganalisis komponen makna dari contoh tuturan yang diambil dari teks tersebut. Adapun teori komponen makna yang digunakan berasal dari Leech (1981) dalam bukunya *Semantics: The Study of Meaning.* Menurut Leech (1981), komponen makna *(components and contrast of meaning)* merupakan pendekatan dalam kajian semantik yang memandang bahwa makna suatu kata dapat dianalisis dengan memecahnya menjadi sejumlah ciri semantik dasar *(semantic features)*. Makna leksikal tidak bersifat tunggal dan utuh, melainkan tersusun dari beberapa unsur makna yang lebih kecil yang membedakan suatu kata dari kata lain dalam satu medan makna yang sama. Dengan kata lain, analisis komponen makna bertujuan untuk mengidentifikasi fitur pembeda yang membentuk makna suatu leksem sehingga hubungan makna antar kata dapat dijelaskan secara lebih sistematis. Dalam pendekatan ini, ciri-ciri semantik biasanya dinyatakan menggunakan simbol

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

(+), (−), dan (0). Tanda (+) menunjukkan bahwa suatu fitur merupakan karakteristik esensial yang melekat pada makna kata tersebut, tanda (−) menunjukkan bahwa fitur tersebut tidak termasuk dalam makna dasar kata tersebut, sedangkan tanda (0) menunjukkan bahwa fitur tersebut bersifat kontekstual atau tidak selalu muncul, tergantung pada situasi penggunaan dalam wacana tertentu.

Pada akhir tahap penelitian, Temuan dari penggunaan teori Searle (1969) dan Leech (1981) kemudian akan digunakan untuk membandingkan gaya kebahasaan melalui pidato di Eropa, negara Frankofon, dan Asia Tenggara. Adapun dari seluruh teks, ditemukan 180 tindak tutur asertif, 63 tindak tutur ekspresif, 42 tindak tutur komisif, 4 tindak tutur direktif, dan 3 tindak tutur deklaratif *(déclaration)*.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Gagasan Prancis *« Perspectives Communes »* pada Hubungannnya dengan Madagaskar

Pidato Presiden Macron disampaikan dalam kunjungannya ke Tananarive, Madagaskar, pada 23 April 2025. Jika dilihat dari sejarahnya, kedua negara memiliki latar belakang sebagai bekas negara terjajah dan penjajah (1896–1960) dengan luka kolonial yang masih membekas, termasuk pembantaian 1947 dan sengketa kepemilikan *Îles Éparses* di Samudra Hindia yang masih diklaim Madagaskar tetapi dikuasai Prancis (Graindorge, 2025). Sengketa ini masih berlangsung hingga pidato disampaikan. Berkaitan dengan isu tersebut, Macron menyampaikan gagasan « *perspectives communes* » 'perspektif bersama' untuk menanggapi permasalahan itu.

Pada pidato ini ditemukan 32 tindak tutur asertif, 15 ekspresif, 11 komisif, dan 1 deklaratif. Sebuah « *perspectives communes* » hanya dapat terbentuk apabila kedua pihak memiliki acuan faktual yang sama. Macron secara strategis menggunakan tindak tutur asertif untuk mengingat kembali fakta sejarah kolonial sekaligus fakta kerja sama yang telah berjalan. Tuturan « *Ces liens ont été parfois, nous le savons, forgés dans la douleur et nous avons engagé un travail mémoriel de fond pour apaiser les mémoires* » 'Hubungan-hubungan ini terkadang, sebagaimana kita ketahui, terbentuk melalui penderitaan, dan kami telah memulai upaya memorial yang mendalam untuk menenangkan ingatan kolektif' mengakui adanya luka historis sekaligus menegaskan komitmen Prancis untuk memprosesnya, yang dilanjutkan dengan « *Madagascar devient ainsi le premier pays où sera mise en œuvre notre loi sur la restitution des restes humains de décembre 2023* » 'Madagaskar menjadi negara pertama tempat undang-undang kami mengenai restitusi sisa-sisa jenazah manusia akan diterapkan' sebagai bukti konkret. Sementara itu, tuturan « *la France demeure l'un des principaux partenaires économiques de Madagascar, à travers des échanges bilatéraux qui, ces trois dernières années, ont dépassé le milliard d'euros par an* » menegaskan posisi Prancis sebagai mitra ekonomi yang konsisten melalui data kuantitatif yang tidak terbantah. Kedua jenis fakta ini disusun secara paralel dalam satu

paragraf sehingga membentuk narasi dari masa lalu yang sedang dibereskan menuju masa kini yang produktif.

Di samping itu, tindak tutur asertif juga berfungsi untuk memproyeksikan arah kerja sama ke depan, seperti pada tuturan « *Cet agenda des restitutions, nous le poursuivrons* » 'Agenda restitusi ini akan terus kami lanjutkan' dan « *Pour autant, les brûlures du passé ne consumeront en rien les liens qui nous unissent* » 'Meskipun demikian, luka-luka masa lalu sama sekali tidak akan menghancurkan hubungan yang menyatukan kita'. Tuturan-tuturan ini secara asertif menyatakan keyakinan Macron dan memberikan dasar pembenaran bagi pergeseran fokus dari penyelesaian historis menuju kerja sama produktif, sehingga « *perspectives communes* » menjadi kesimpulan yang muncul secara alamiah dari fakta-fakta yang dipaparkan. Untuk memperkuat analisis tindak tutur di atas, dilakukan analisis komponen makna pada beberapa kata pilihan yang digunakan Macron dalam menjelaskan latar belakang historis Prancis–Madagaskar.

Tabel 2. Analisis Komponen Makna dalam Konteks Sejarah Prancis-Madagascar

| | *Douleur* | *Brûlures* | *Mémoires* | *Travail mémoriel* | *Restitution* |
|---|---|---|---|---|---|
| *La violence* 'Kekerasan' | + | + | 0 | 0 | 0 |
| *Temporalité passée* 'Temporalitas masa lalu' | + | + | + | 0 | 0 |
| *l'initiative de la France* 'Inisiatif Prancis' | - | - | - | 0 | + |

Komponen *« la violence »* memperlihatkan bagaimana setiap kata merujuk pada kekerasan kolonial. Kata *« douleur »* dan *« brûlures »* mendapat tanda (+) karena keduanya secara langsung menunjuk pada penderitaan fisik dan psikologis, dengan *« brûlures »* lebih kuat secara metaforis karena memvisualisasikan luka pada tubuh. Macron menggunakan keduanya dalam frasa *« forgés dans la douleur »* dan *« les brûlures du passé »* yang mengakui kekerasan tanpa menyebutkan pelakunya. Kata *« mémoires »*, *« travail mémoriel »*, dan *« restitution »* mendapat tanda (0) karena ketiganya hanya merujuk pada konsekuensi atau respons terhadap kekerasan, bukan kekerasan itu sendiri.

Komponen *« Temporalité passée »* mengidentifikasi rujukan pada dimensi waktu yang sudah terjadi. Kata *« douleur »*, *« brûlures »*, dan *« mémoires »* mendapat tanda (+) karena digunakan dalam frasa yang merujuk pada masa lalu, sehingga menempatkan pengalaman kekerasan sebagai sesuatu yang sudah lewat dan tidak lagi diperhatikan. Kata *« travail mémoriel »* dan *« restitution »* mendapat tanda (0) karena merujuk pada tindakan yang sedang berlangsung di masa kini meskipun objeknya adalah masa lalu.

Komponen *« l'initiative de la France »* memperlihatkan sejauh mana setiap kata menampilkan Prancis sebagai pihak yang berinisiatif. Kata *« restitution »* mendapat tanda (+) karena secara eksplisit ditampilkan sebagai inisiatif Prancis melalui rujukan pada *« notre loi sur la restitution »*. Kata *« travail mémoriel »* mendapat tanda (0) karena ditampilkan sebagai

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

tindakan Prancis melalui *« nous avons engagé un travail mémoriel »*, tetapi secara leksikal bersifat netral. Kata *« douleur »*, *« brûlures »*, dan *« mémoires »* mendapat tanda (−) karena tidak menampilkan Prancis sebagai aktor, melainkan hanya sebagai kondisi tanpa subjek pelaku yang jelas.

Hasil analisis komponen makna dia atas, pada leksikon yang merujuk pada kekerasan kolonial, Prancis tidak ditampilkan sebagai pelaku dan kekerasan ditampilkan sebagai peristiwa masa lalu, sementara pada leksikon yang menampilkan tindakan reparatif, Prancis justru ditampilkan sebagai inisiator aktif. Pola ini memperkuat fungsi tindak tutur asertif yang telah dianalisis, yakni Macron secara konsisten menempatkan Prancis sebagai aktor positif yang sedang menyelesaikan luka sejarah, bukan sebagai pelaku yang harus mempertanggungjawabkannya.

Untuk kepulauan yang disengketakan, Macron memilih frasa *« perspectives communes de développement et de coopération »* yang menggeser inti persoalan dari isu kedaulatan dan pengembalian wilayah menjadi isu kerja sama pembangunan. Dengan kata lain, *« perspectives communes »* digunakan sebagai pengganti gagasan restitusi pada wilayah yang tidak ingin dikembalikan Prancis, sehingga Prancis tetap dapat menjaga kontrol atas Îles Éparses sambil menampilkan diri sebagai mitra yang terbuka pada kerja sama setara.

### 3.2 Reformasi Hubungan Prancis dan Inggris dalam Gagasan *« Entente Amicale »*

Pidato Presiden Macron disampaikan dalam kunjungan kenegaraannya ke Windsor, Inggris, dalam jamuan resmi yang diselenggarakan oleh Raja Charles III. Kunjungan ini merupakan kunjungan kenegaraan presiden Prancis pertama ke Inggris Raya sejak Brexit pada 2020, yang mengubah secara mendasar hubungan kedua negara di kawasan Eropa. Jika dilihat dari sejarahnya, hubungan Prancis-Inggris ditandai oleh dinamika yang khas, yakni berabad-abad rivalitas militer, kolonial, dan kultural yang kemudian berubah menjadi aliansi strategis melalui *« Entente Cordiale »* tahun 1904. Perjanjian historis tersebut mengakhiri persaingan kolonial kedua negara dan meletakkan dasar bagi aliansi yang berlanjut hingga dua Perang Dunia. Dalam konteks pasca-Brexit, kebutuhan untuk merumuskan ulang karakter hubungan bilateral menjadi mendesak. Berkaitan dengan situasi ini, Macron menyampaikan sebuah gagasan baru, yakni *« entente amicale »* 'persetujuan persahabatan', sebagai evolusi dari *« entente cordiale »* yang telah berusia lebih dari seabad. Pidato ini bersifat bilingual, disampaikan dalam bahasa Prancis dan Inggris secara bergantian, di mana bahasa Inggris digunakan untuk bagian yang ditujukan langsung kepada audiens Inggris, sementara bahasa Prancis digunakan untuk menampilkan keintiman emosional dan referensi historis yang lebih dalam. Untuk analisis komponen makna, fokus diberikan pada leksikon kunci

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

dalam bahasa Prancis yang membingkai gagasan *« entente amicale »*, sementara untuk analisis tindak tutur, seluruh tuturan dianalisis tanpa membedakan bahasa karena klasifikasi Searle bersifat universal lintas bahasa.

Pada pidato ini ditemukan 34 tindak tutur asertif, 14 ekspresif, 2 deklaratif, 1 komisif, dan 1 direktif. Pidato ini menghadirkan variasi tindak tutur yang lebih lengkap dibandingkan dua pidato sebelumnya dengan kehadiran tindak tutur deklaratif yang memiliki peran sentral dalam mendukung gagasan *« entente amicale »*. Tindak tutur asertif digunakan untuk menarasikan sejarah hubungan Prancis-Inggris sebagai narasi yang berakhir pada persaudaraan, seperti pada tuturan *« Quant à nos deux peuples, nous avons été, au cours de l'histoire, des ennemis si fidèles, si dévoués, que nous ne pouvions pas ne pas devenir amis. Mieux, frères, par le sang, par l'espoir, par la gloire »* 'Adapun kedua bangsa kita, sepanjang sejarah, telah menjadi musuh yang begitu setia dan begitu berdedikasi, sehingga kita tidak mungkin tidak menjadi sahabat. Bahkan lebih dari itu, saudara, oleh darah, oleh harapan, oleh kemuliaan'. Tuturan assertif ini menyatakan keyakinan Macron bahwa rivalitas historis justru melahirkan persaudaraan, sekaligus menggunakan kata *« frères »* sebagai inti pembingkaian hubungan bilateral.

Selain itu, tindak tutur asertif digunakan untuk menampilkan posisi Prancis-Inggris yang berdampingan dalam menghadapi tantangan geopolitik, seperti pada tuturan *« Cette fidélité à nos histoires intimement intriquées, cette disposition à se tenir debout et côte à côte quand nos valeurs, c'est-à-dire nos existences, sont menacées telle est la force de l'Alliance franco-britannique »* 'Kesetiaan pada sejarah kita yang saling terjalin secara intim ini, kesediaan untuk berdiri tegak dan berdampingan ketika nilai-nilai kita, yakni keberadaan kita, terancam, itulah kekuatan Aliansi Prancis-Britania'. Tuturan ini sekaligus menampilkan tiga leksikon kunci sekaligus, yakni *« côte à côte »*, *« alliance »*, dan ikatan historis yang mempersiapkan landasan retoris bagi *« entente amicale »*. Tindak tutur asertif juga digunakan untuk memposisikan Prancis-Inggris sebagai kekuatan geopolitik bersama, seperti pada tuturan *« Ensemble, le Royaume-Uni et la France, puissances de paix et de progrès, ont la capacité d'entraîner les nations en Europe et ailleurs »* 'Bersama, Britania Raya dan Prancis, kekuatan perdamaian dan kemajuan, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa-bangsa di Eropa dan tempat lain', yang sangat strategis dalam konteks pasca-Brexit.

Pola asertif tersebut juga didukung oleh dua tindak tutur deklaratif yang untuk menyampaikan gagasan *« entente amicale »*. Tuturan *« Nous avons décidé, en effet, de conclure un débat qui dure depuis au fond 70 ans, et de prêter à la Grande-Bretagne un joyau emblématique de notre histoire, la tapisserie de Bayeux »* 'Kami telah memutuskan untuk mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung selama 70 tahun, dan meminjamkan kepada Inggris Raya

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

permata simbolis sejarah kami, Permadani Bayeux' yang menyiratkan bahwa perdebatan tujuh dekade telah berakhir melalui peminjaman Permadani Bayeux. Pada titik inilah dominasi tindak tutur asertif membantu mempertajam gagasan *« entente amicale »* melalui premis sejarah, budaya, dan geopolitik, sehingga Prancis dapat memposisikan dirinya sebagai mitra setara Inggris yang berbagi tanggung jawab kepemimpinan di Eropa pasca-Brexit. Untuk memperkuat analisis tindak tutur di atas, dilakukan analisis komponen makna pada beberapa kata pilihan yang digunakan Macron dalam membingkai gagasan *« entente amicale »*.

Tabel 4. Analisis Komponen Makna dalam Konteks Hubungan Prancis-Inggris

| | *Amicale* | *Frères* | *Côte à côte* | *Alliance* |
|---|---|---|---|---|
| *L'égalité* 'kesetaraan' | + | + | + | 0 |
| *L'Intimité* 'Keintiman' | + | + | 0 | - |
| *Caractère stratégique* 'Karakter strategis' | - | 0 | + | + |

Komponen *« l'égalité »* mengidentifikasi bagaimana setiap kata merujuk pada kesetaraan posisi antara kedua negara. Kata *« amicale »* 'bersahabat' mendapat tanda (+) karena persahabatan secara semantik menjelaskan dua pihak yang berada pada posisi setara, berbeda dengan *« cordiale »* 'sopan-hangat' yang masih membawa muatan formalitas diplomatik. Kata *« frères »* 'saudara' juga mendapat tanda (+) karena hubungan persaudaraan menempatkan kedua pihak dalam posisi yang setara, bahkan lebih dari sekadar mitra. Kata *« côte à côte »* 'berdampingan' mendapat tanda (+) karena secara spasial menampilkan posisi sejajar tanpa hierarki. Kata *« alliance »* 'aliansi' mendapat tanda (0) karena meskipun secara umum mengandaikan kerja sama, secara historis aliansi bisa bersifat hierarkis dengan salah satu pihak sebagai pemimpin.

Analisis komponen *« l'Intimité »* menunjukkan keintiman afektif yang dibawa setiap kata. Kata *« amicale »* dan *« frères »* mendapat tanda (+) karena keduanya secara langsung membawa muatan emosional yang hangat. *« Amicale »* merujuk pada persahabatan yang bersifat personal dan suka rela, sementara *« frères »* merujuk pada ikatan persaudaraan yang bahkan lebih dalam dari persahabatan. Kata *« côte à côte »* mendapat tanda (0) karena lebih menampilkan dimensi posisional daripada keintiman emosional, meskipun konteks penggunaannya dapat memberikan nuansa afektif. Kata *« alliance »* mendapat tanda (−) karena merujuk pada kesepakatan strategis yang bersifat formal dan rasional, bukan afektif.

Komponen *« Caractère stratégique »* mengidentifikasi karakter strategis-politis setiap kata. Kata *« alliance »* mendapat tanda (+) karena secara langsung merujuk pada dimensi kekuatan dan kerja sama strategis. Kata *« côte à côte »* juga mendapat tanda (+) karena dalam konteks pidato Macron, frasa ini digunakan untuk menggambarkan posisi pertahanan bersama menghadapi ancaman geopolitik seperti agresi Rusia di Ukraina. Kata *« frères »* mendapat tanda (0) karena meskipun terutama bersifat afektif, persaudaraan yang dimaksud Macron dikualifikasi oleh

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

frasa *« par le sang, par l'espoir, par la gloire »* yang membawa dimensi pengorbanan perang dan kerja sama strategis. Kata *« amicale »* mendapat tanda (−) karena persahabatan secara leksikal bersifat personal dan afektif, bukan strategis.

Pergeseran leksikal dari *« cordiale »* ke *« amicale »* merupakan transformasi karakter hubungan bilateral dari diplomasi formal-protokoler menjadi kemitraan yang lebih intim, setara, dan personal. Jika *« entente cordiale »* 1904 dibangun di atas kesepakatan strategis antara dua kekuatan kolonial yang baru saja mengakhiri rivalitas, *« entente amicale »* 2025 dibingkai sebagai aliansi yang lahir dari ikatan emosional dan posisi setara antara dua bangsa yang sudah lama saling mengenal. Pola ini memperkuat fungsi tindak tutur asertif dan deklaratif yang telah dianalisis sebelumnya, yakni Macron secara konsisten menampilkan keintiman afektif dan kesetaraan posisi melalui *« frères »*, *« côte à côte »*, dan *« amicale »* sebagai landasan retoris bagi gagasan ini. Dengan kata lain, *« entente amicale »* digunakan untuk merumuskan ulang karakter hubungan bilateral pasca-Brexit, di mana Prancis dan Inggris kini ditampilkan bukan sebagai dua kekuatan yang menegosiasikan kepentingan, melainkan sebagai dua "saudara" yang berdiri berdampingan menghadapi tantangan bersama, sekaligus sebagai kepemimpinan kolektif Eropa di tengah ketidakpastian geopolitik pasca-Brexit.

### *3.3 « Partenariat de souveraineté »* sebagai Strategi Prancis dalam Hubungannya dengan Indonesia

Pidato Presiden Macron disampaikan dalam kunjungan kenegaraannya ke Jakarta, Indonesia, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Macron ke kawasan Asia Tenggara. Kunjungan ini berlangsung pada tahun peringatan hubungan diplomatik Prancis-Indonesia, sebagaimana ditandai dengan undangan Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan parade 14 Juli di Paris. Konteks geopolitik pidato ini ditandai oleh ketidakstabilan global, ketegangan perdagangan akibat tarif Amerika Serikat, perang Rusia di Ukraina, konflik Israel-Palestina yang menjadi isu emosional di kalangan negara mayoritas Muslim, serta persaingan Tiongkok-Amerika di Indo-Pasifik. Jika dilihat dari posisi Indonesia, negara ini memiliki latar belakang historis sebagai pelopor gerakan non-blok melalui Konferensi Bandung 1955, sekaligus sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dengan posisi strategis di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Status Indonesia sebagai kekuatan regional yang berpegang teguh pada politik luar negeri bebas-aktif menjadikannya mitra yang strategis sekaligus menantang. Berkaitan dengan situasi ini, Macron menyampaikan sebuah gagasan, yakni *« partenariat de souveraineté »* 'kemitraan kedaulatan', yang justru membalikkan paradoks diplomatik antara saling ketergantungan kemitraan dengan kemandirian kedaulatan.

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

Pada pidato ini ditemukan 32 tindak tutur asertif, 13 ekspresif, 6 komisif, 2 direktif, dan tidak ditemukan tindak tutur deklaratif. Tindak tutur asertif digunakan untuk memaparkan kesamaan visi politik luar negeri antara Prancis dan Indonesia, seperti pada tuturan *« D'abord et avant tout, je dois dire que nous partageons une même volonté d'indépendance, d'autonomie »* 'Pertama dan terutama, saya harus mengatakan bahwa kita berbagi kemauan yang sama untuk kemerdekaan, otonomi'. Tuturan ini sekaligus menampilkan dua leksikon kunci, yakni *« indépendance »* dan *« autonomie »*, yang berfungsi sebagai landasan retoris bagi gagasan *« partenariat de souveraineté »*. Macron juga memaparkan latar belakang historis Indonesia secara asertif melalui tuturan *« Nous n'oublions pas que l'Indonésie est un pays qui s'est battu pour son indépendance, qui a aussi, dès 1945, ouvert une voie et, 10 ans plus tard, établi une doctrine et en quelque sorte porté une vision singulière du multilatéralisme »* 'Kami tidak melupakan bahwa Indonesia adalah negara yang berjuang untuk kemerdekaannya, yang juga sejak 1945 membuka jalan dan, sepuluh tahun kemudian, membentuk doktrin dan dengan caranya membawa visi multilateralisme yang unik', yang menampilkan pengakuan Prancis terhadap doktrin non-blok Indonesia sebagai sesuatu yang bernilai dan layak dilanjutkan.

Selain itu, tindak tutur asertif digunakan untuk merangkum filosofi politik luar negeri bersama melalui tuturan kunci *« Au fond, je dirais que ce qui nous unit, c'est que nous ne voulons la guerre avec personne, mais nous ne voulons dépendre de personne »* 'Pada dasarnya, saya akan mengatakan bahwa yang menyatukan kita adalah bahwa kita tidak menginginkan perang dengan siapa pun, tetapi kita juga tidak ingin bergantung pada siapa pun'. Tuturan ini secara padat merangkum filosofi politik luar negeri bersama yang berakar pada doktrin non-blok Indonesia tetapi diperluas menjadi platform kerja sama bilateral, sekaligus memperkenalkan leksikon *« dépendre »* dalam konstruksi negatif sebagai antitesis. Kemudian, tindak tutur asertif digunakan untuk menampilkan substansi konkret kemitraan, seperti pada tuturan *« Pour servir cette vision, ce partenariat de souveraineté, ces équilibres, nous avons consolidé ces dernières années, dans la défense et la sécurité, un lien inédit »* 'Untuk melayani visi ini, kemitraan kedaulatan ini, keseimbangan ini, kami telah mengonsolidasikan beberapa tahun terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan, sebuah hubungan yang belum pernah ada sebelumnya', yang sekaligus menampilkan leksikon utama secara berurutan, yakni *« souveraineté »*, *« équilibres »*, dan kemitraan operasional. Pola asertif ini diperkuat oleh kehadiran tindak tutur komisif seperti *« je soutiens pleinement la conclusion d'un accord de partenariat global entre l'Europe et l'Indonésie »* 'saya sepenuhnya mendukung kesimpulan perjanjian kemitraan

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

global antara Eropa dan Indonesia', yang menjanjikan komitmen Prancis untuk memperluas kemitraan ke tingkat regional ASEAN-Uni Eropa. Untuk memperkuat analisis tindak tutur di atas, dilakukan analisis komponen makna pada beberapa kata pilihan yang digunakan Macron dalam membingkai gagasan *« partenariat de souveraineté ».*

Tabel 7. Analisis Komponen Makna dalam Konteks Hubungan Prancis-Indonesia

| | *Souveraineté* | *Indépendance* | *Autonomie* | *Équilibre* | *Dépendre* |
|---|---|---|---|---|---|
| *La liberté d'action* 'kebebasan bertindak' | + | + | + | 0 | - |
| *Refus de l'alignement* 'Penolakan terhadap penyelarasan' | 0 | + | + | + | + |
| *Être collaboratif* 'Menjadi kolaboratif' | + | 0 | 0 | + | - |

Komponen *« La liberté d'action »* mengidentifikasi bagaimana setiap kata merujuk pada hak menentukan nasib sendiri yang menjadi inti politik luar negeri Indonesia maupun doktrin Macron. Kata *« souveraineté »* 'kedaulatan' mendapat tanda (+) karena secara langsung merujuk pada kekuasaan tertinggi suatu pihak untuk menentukan diri tanpa intervensi pihak luar. Kata *« indépendance »* 'kemerdekaan' juga mendapat tanda (+) karena merujuk pada status bebas dari ketergantungan atau penjajahan pihak lain. Kata *« autonomie »* 'otonomi' mendapat tanda (+) karena merujuk pada kapasitas suatu pihak untuk bertindak menurut aturan dan kehendaknya sendiri. Kata *« équilibre »* 'keseimbangan' mendapat tanda (0) karena meskipun tidak secara langsung merujuk pada autodeterminasi, keseimbangan yang dimaksud Macron adalah keseimbangan yang memungkinkan pihak-pihak menjaga otonominya. Kata *« dépendre »* 'bergantung' mendapat tanda (−) karena justru merujuk pada hal yang berlawanan dengan autodeterminasi, yakni ketergantungan pada pihak lain.

Komponen *« Refus de l'alignement »* mengidentifikasi bagaimana setiap kata mengandung muatan politik luar negeri non-blok yang menolak penyelarasan dengan kekuatan besar. Kata *« indépendance »* dan *« autonomie »* mendapat tanda (+) karena keduanya secara historis dan konseptual berakar pada doktrin non-blok yang menolak penyelarasan dengan blok kekuatan tertentu. Kata *« équilibre »* juga mendapat tanda (+) karena merujuk pada posisi yang seimbang di antara berbagai kekuatan tanpa berpihak pada salah satunya. Kata *« dépendre »* mendapat tanda (+) sebagai antitesis yang justru memperkuat makna non-blok, karena Macron menggunakannya dalam konstruksi negatif *« nous ne voulons dépendre de personne »*. Kata *« souveraineté »* mendapat tanda (0) karena meskipun kedaulatan secara umum mengandaikan kemerdekaan dari intervensi, dalam konteks geopolitik modern kedaulatan suatu negara dapat tetap dipertahankan meskipun berada dalam aliansi strategis tertentu, sehingga tidak selalu identik dengan non-blok.

Komponen *« Être collaboratif »* mengidentifikasi bagaimana setiap kata mengandung karakter kolaboratif yang memungkinkan kemitraan bilateral. Kata *« souveraineté »* mendapat

Volume 14, Nomor 2, 2026 E-ISSN: **2621-5101** P-ISSN:**2354-7294**

tanda (+) karena dalam frasa *« partenariat de souveraineté »*, kedaulatan justru ditampilkan sebagai sesuatu yang dapat dibangun bersama, bukan ditegakkan sendirian. Kata *« équilibre »* mendapat tanda (+) karena keseimbangan secara semantik membutuhkan minimal dua pihak yang saling mengimbangi. Kata *« indépendance »* dan *« autonomie »* mendapat tanda (0) karena keduanya secara leksikal lebih menekankan dimensi individual daripada kolaboratif, meskipun dalam konteks pidato Macron, kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan kerja sama Prancis-Indonesia yang memperkuat kemerdekaan dan otonomi masing-masing. Kata *« dépendre »* mendapat tanda (−) karena dalam pidato digunakan untuk menolak ketergantungan, bukan untuk menggambarkan kolaborasi.

Hasil analisis komponen makna memperlihatkan pola yang berkaitan dengan gagasan *« partenariat de souveraineté »*. Pemilihan leksikon secara konsisten membangun konsep yang menyatukan dua hal yang sekilas tampak bertentangan, yakni kemitraan yang mengandaikan kerja bersama dengan kedaulatan yang mengandaikan kemandirian. Pola ini memperkuat fungsi tindak tutur asertif yang telah dianalisis sebelumnya, yakni Macron secara konsisten menggeser konsep kedaulatan dari dimensi soliter menjadi dimensi kolaboratif, sehingga Prancis dan Indonesia dapat ditampilkan sedang membangun kedaulatan masing-masing justru melalui kemitraan satu sama lain. Dengan kata lain, *« partenariat de souveraineté »* digunakan sebagai strategi diskursif untuk menawarkan model kerja sama alternatif yang tidak hierarkis dan tidak mengikat, berbeda dengan model aliansi tradisional yang biasanya menuntut penyelarasan strategis dengan kekuatan besar. Strategi ini memungkinkan Prancis untuk menempatkan dirinya sebagai mitra yang menghormati politik luar negeri bebas-aktif Indonesia, sekaligus menawarkan jalan tengah yang menarik di tengah tekanan polarisasi antara blok Amerika dan blok Tiongkok di Indo-Pasifik.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap enam pidato kenegaraan Emmanuel Macron sepanjang 2025, ditemukan bahwa tindak tutur asertif mendominasi seluruh pidato dan berfungsi sebagai premis faktual yang melegitimasi gagasan diplomatik di setiap kawasan, tetapi konfigurasi tindak tutur pendukungnya berbeda sesuai konteks. Di kawasan frankofon, asertif didominasi oleh pemaparan sejarah kolonial tanpa komisif yang kuat, mencerminkan posisi Prancis yang harus mengelola beban historis tanpa melepaskan kontrol atas wilayah sengketa. Sementara itu, kawasan Eropa, deklaratif performatif di Inggris dan komisif intensif di Norwegia menandai upaya Prancis mengukuhkan kepemimpinan regional pasca-Brexit sekaligus memperluas batas konseptual Eropa melampaui Uni Eropa. Kemudian di Asia Tenggara, dominasi komisif disertai kontras eksplisit dengan penarikan diri Amerika memposisikan Prancis sebagai alternatif stabil di tengah polarisasi geopolitik.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Wulandari dkk. (2022) dan Ybañez dkk. (2025) yang menemukan dominasi asertif sebagai sarana legitimasi

politik domestik, dengan menunjukkan bahwa dalam wacana diplomasi internasional asertif justru berfungsi sebagai landasan faktual yang melegitimasi gagasan diplomatik yang bersifat strategis. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan *Revue Nationale Stratégique* 2025, yaitu memperkuat *autonomie stratégique*, memperluas jaringan diplomatik, dan mempertahankan pengaruh di kawasan-kawasan strategis. Oleh karena itu, pilihan ujaran dan makna dalam keenam pidato tersebut bukan sekadar gaya retoris, melainkan realisasi linguistik dari hierarki kepentingan diplomatik Prancis di tiga kawasan. Penggabungan teori tindak tutur Searle dan komponen makna Leech yang digunakan dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa pilihan ujaran dan makna dalam pidato kenegaraan Macron 2025 berfungsi sebagai sarana pembentukan citra, legitimasi, dan posisi strategis Prancis dalam relasi bilateral serta tatanan geopolitik di kawasan Eropa, Asia Tenggara, dan negara frankofon.

## 5. Daftar Pustaka

Afp. (2025). *La visite d'Emmanuel Macron s'achève à Maurice, la sécurité au cœur des discussions*. FranceInfo. https://la1ere.franceinfo.fr/reunion/la-visite-d-emmanuel-macron-s-acheve-a-maurice-la-securite-au-cur-des-discussions-1645285.html

Bharti, M, S., Singh, A. (2023). India and France Bilateral Partnership for Advancing Strategic Autonomy in the Indo-Pacific Region: Special Reference to the Indo-French Strategic Partnership. *Cogent Social Sciences, 9: 2215561*. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2215561

Carta, C., & Morin, J.-F. (2014). *EU foreign policy through the lens of discourse analysis: Making sense of diversity*. Ashgate. https://www.academia.edu/4504352/Carta_C_and_JF_Morin_eds_2014_EUs_Foreign_Policy_Through_the_Lenses_of_Discourse_Analysis_Farnham_Ashgate_?auto=download

Chaaban, F. (2025). Cinq ans après le Brexit, Emmanuel Macron joue la carte du rapprochement stratégique avec Londres. *Touteleurope.eu*. https://www.touteleurope.eu/vie-politique-des-etats-membres/cinq-ans-apres-le-brexit-emmanuel-macron-joue-la-carte-du-rapprochement-strategique-avec-londres/

Creswell, J, W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication, Inc.

Fontanel, J. (2025). The political, economic and social fractures of France at the dawn of the year 2025. *HAL Open Science*, hal-04949471. https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-04949471v1

Graindorge, T. (2025, April 23). Pourquoi les îles Éparses sont au cœur des discussions entre la France et Madagascar. *Le Point.fr*. https://www.lepoint.fr/monde/pourquoi-les-iles-eparses-sont-au-coeur-des-discussions-entre-la-france-et-madagascar-23-04-2025-2588064_24.php

Gulamjonovich, K, R. (2024). Communicative and Pragmatic Features of Diplomatic Discourse: A Linguistic-Pragmatic Perspective. *World Bulletin of Management and Law (WBML)* Volume-41, December 2024. https://www.scholarexpress.net

Karalis, I. (2025). 7 mai 1954 : quand la bataille de Diên Biên Phu signait la fin de la présence française en

Indochine. *Révolution Permanente*. https://www.revolutionpermanente.fr/7-mai-1954-quand-la-bataille-de-Dien-Bien-Phu-signait-la-fin-de-la-presence-francaise-en-Indochine-36646

Kurbalija, J., Slavik, H. (2001). *Language and Diplomacy*. http://www.ati.usacademy.org/Books/Language_and_Diplomacy.pdf

Leech, G. (1981). *Semantics: The Study of Meaning Second edition – Revised and Updated*. Penguin Books.

Lei Li. (2020). Pragmatic Approach to Determiners in Diplomatic Language. *International Journal of Arts and Social Science,* ISSN: 2581-7922 Volume 3 Issue 3, May-June 2020. https://www.ijassjournal.com/2020/V3I3/41465751891.pdf

López-Aranguren, J, L. (2021). The EU's strategic projection in the Indo-Pacific. *Cuadernos Europeos de Deusto, ISSN-e: 2445-3587, Núm. Especial 03 (Enero 2022), Bilbao, págs. 29-49. http://dx.doi.org/10.18543/ced-03-2022pp29-49*

Malis, M., Smith, A. (2021). State Visits and Leader Survival. *American Journal of Political Science*, *65*(1), 241–256. http://www.jstor.org/stable/45415624

*Maurice et France face à l'impasse Tromelin*. (n.d.). Le Defi Media Group. https://defimedia.info/maurice-et-france-face-limpasse-tromelin

Milhiet, P. (2025). France and Mauritius: Strengthening ties in the Indian Ocean. *The Diplomat*. https://thediplomat.com/2025/12/france-and-mauritius-strengthening-ties-in-the-indian-ocean/

Młynarski, T. (2024). The Implications of Strengthening 'European Strategic Autonomy' and Its Defence Capabilities for the Growth of France's Global Importance and Power. *Politeja* 21 (1(88/1): 223-37. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.13.

Mouritzen, K., Fabricius, A. (2016). Understanding the linguistic characteristics of the Great Speeches, A sociolinguistic project. https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/58885152/Understanding_the_linguistic_characteristics_of_the_great_speeches.pdf

Oc. (2025). Macron entame une visite en Norvège (une première depuis 41 ans pour un président) alors que Naval Group. BFM BUSINESS. https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/defense/macron-entame-une-visite-en-norvege-une-premiere-depuis-41-ans-pour-un-president-alors-que-naval-group-veut-vendre-des-fregates-a-oslo_AD-202506230424.html

Purnomo, B. (2025). Pragmatic Functions of Peace Diplomacy in President Prabowo's United Nations Address. *ELITERATE : Journal of English Linguistics and Literature Studies* Vol. 5 (1) 2025, December 2025. https://ojs.unm.ac.id/Eliterate/article/download/77744/35028

Ratnawati., Sulastri., & Idrus, N, A. (2025). Politeness Strategies and Diplomatic Identity: A Pragmatic Analysis of Prabowo Subianto's UN General Assembly Speech. *PPSDP International Journal of Education, Volume 4 (2) (Special Issue) 5-7 November 2025, 679-689. https://doi.org/10.59175/pijed.v4i2.789*

*Revue nationale stratégique 2025 | SGDSN*. (n.d.). SGDSN.

https://www.sgdsn.gouv.fr/publications/revue-nationale-strategique-2025

Searle, J. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press. https://www.scribd.com/doc/293615963/John-R-Searle-Speech-Acts

Wulandari, R., Yuningsih, R., Ismail, S. (2022). L'acte de Parole Illocutoire dans une Interview du Président Français Emmanuel Macron Concernant la Stratégie de Traitement des Cas de Covid-19 En France en Mois d'Octobre 2020. *Lingua Litteria Journal*, JLL 9 (1) (2022). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lel

Ybañez, M, S, N., Punzalan, M, P., Amante, I, F., Lariosa, G, E, L., Castillano, J, V., & Banguis, R, M. (2025). Governance in the Digital Sphere: A Speech Act Analysis of Presidential State of the Nation Addresses. International Journal on Culture, History, and Religion *7*(SI1), 1-18. https://doi.org/10.63931/ijchr.v7iSI2.190

Yule, G. (2010). *The Study of Language*, fourth edition. Cambridge University Press. https://sharifling.files.wordpress.com/2018/09/the-study-of-language-george-yule.pdf